PROSEDUR PENYUSUNAN REKENING KORAN MANUAL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK



MEITHA DEVIANKA NIM: 2105311075

TUGAS AKHIR HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Diploma III Politeknik

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2024



lak Cipt

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Meitha Devianka

NIM : 2105311075

Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis

Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Penyusunan Rekening Manual pada

Reden Kayangan Daerah Kata Danak

Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Depok, 29 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr., M. Ikhsan, M.Si.

NIP. 196309131988031002

Dra., Mawarta Onida Sinaga, M.Si.

NIP. 196203061990032001

Mengetahui, Ketua Jurusan Administrasi Niaga

Dr. Dya., Iis Mariani, M.Si. NIP. 196501311989032001



Hak Cipta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Meitha Devianka

NIM : 2105311075

Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis

Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Penyusunan Rekening Manual pada

Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Telah berhasil dipertahankan dihadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 7 Agustus 2024

Waktu : 10:30 – 11:30 WIB

JAKARTA

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr., M. Ikhsan, M.Si.

NIP : 196309131988031002

Penguji I : Ratri Kurniasari, M.Ak. NIP : 199109152022032007

Penguji II : Erlyn Rosalina, S.Hum., M.Pd.

NIP : 198711122019032011

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



Jak Cint

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul "Prosedur Penyusunan Rekening Koran Manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok". Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Program Studi Administrasi Bisnis Diploma III Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Atas segala bantuan dan bimbingannya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Dr. Syamsurizal, SE., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- 2. Dr. Dra., Iis Mariam, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga.
- 3. Taufik Akbar, S.E, M.S.M., selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis.
- 4. Dr. M Ikhsan, M.Si., selaku dosen pembimbing materi yang telah meluangkan waktu, pikiran, kesabaran, dan perhatiannya dalam membimbing penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
- 5. Dra., Mawarta Onida Sinaga, M.Si., selaku dosen pembimbing teknis penulisan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dan arahan hingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir ini dengan baik.
- 6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Jurusan Administrasi Niaga yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
- 7. Pak Ahmad Andri selaku Kepala Bidang Akuntansi, Pak Anton Yudha selaku Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan, Bu Rike Astining selaku Kasubbid Pengolahan Data Keuangan, Bu Andonowarih selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu sekaligus mentor, Pak Irfan Taufik selaku staf Analis Laporan Keuangan, Pak Romy Ardisa selaku staf Pengolah Data dan Informasi, dan seluruh staf bidang Akuntansi dan Pengolah Data yang dengan kesabaran dan



Hak Cipt

○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- ketulusan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis selama praktik kerja lapangan.
- 8. Kedua orang tua penulis Karnowo dan Evi Rachmawati, serta adik penulis Shabirah dan Yasin yang senantiasa memberikan doa-doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan perjalanan penulisan tugas akhir ini.
- 9. Muhamad Arfa Aliq Adriasa, yang senantiasa memberi dukungan, motivasi, dan menemani penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu keseluruhan dalam proses penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang membangun agar tugas akhir ini dapat menjadi lebih baik. Demikian tugas akhir ini penulis susun, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.





Hak Cipta:

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUANi
LEMBAR PENGESAHANii
KATA PENGANTARiii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBARviii
DAFTAR LAMPIRANix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang1
1.2 Ruang Lingkup
1.3 Tujuan Penulisan 2
1.4 Manfaat Penulisan
1.5 Metode Pengumpulan Data
BAB II LANDASAN TEORI4
2.1 Pengertian Prosedur
2.2 Manfaat Prosedur
2.3 Pengertian Keuangan Publik5
2.4 Rekening Koran
2.5 Buku Kas Umum
2.5.1 Pengertian Buku Kas Umum
2.5.2 Manfaat Buku Kas Umum
2.5.3 Pemindahbukuan transaksi ke Buku Kas Umum
2.6 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)9
2.6.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)9
2.6.2 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2.6.3 Periode Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)



dak Ciptរ

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

2.6.5 Ketentuan Pengelompokkan Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 11 BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI 13 3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Badan Keuangan Daerah Kota Depok...... 16 BAB IV PEMBAHASAN......18 4.1 Prosedur Penyusunan Rekening Koran Manual pada Badan Keuangan Daerah 4.2 Dokumen yang dibutuhkan dalam Penyusunan Rekening Koran Manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok24 4.2.1 Rekening Koran Kasda Bank BJB24 4.3 Kendala dalam Penyusunan Rekening Koran Manual pada Badan Keuangan



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta: I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok	. 16
Gambar 4.2	Rekening koran manual	. 23
Gambar 4.3	Rekening koran kasda Bank BJB	. 24
Gambar 4.4	Buku kas umum	. 25
Gambar 4.5	Register SP2D	. 26
Gambar 4.6	Rekapitulasi penerimaan	. 27
Gambar 4.7	Rekapitulasi register surat tanda setor (STS)	. 27





Hak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara dengan Irfan Taufik Analis Laporan Keuangan pad	la
Badan Keuangan Daerah Kota Depok	33
Lampiran 2 Daftar Wawancara dengan staf Pengolah Data dan Informasi pad	la
Badan Keuangan Daerah Kota Depok	34
Lampiran 3 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok 3	36
Lampiran 4 Rekening Koran Manual Badan Keuangan Daerah Kota Depok 3	37
Lampiran 5 Dokumen Kontrol Rekening Koran Manual 3	38





Hak Cinta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah adalah hal penting untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan karena pendanaan yang bersumber dari keuangan daerah merupakan sarana utama untuk mendukung dan melaksanakan berbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci tercapainya pembangunan yang optimal. Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok mempunyai peran penting untuk mendorong transparansi, ketepatan, dan keberhasilan penataan keuangan daerah.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok berperan aktif dalam penataan keuangan daerah yang tidak hanya sebatas administrasi, melainkan mencakup perencanaan, pelaksaan, pengendalian, dan evaluasi seluruh aktivitas keuangan daerah. Salah satu tugas BKD Kota Depok adalah menyusun laporan keuangan daerah yang komprehensif dan akurat. Sebelum laporan keuangan daerah disusun, BKD Kota Depok terlebih dahulu menyusun laporan realisasi anggaran yang digunakan untuk membandingkan anggaran yang sudah ditetapkan dengan anggaran yang sudah direalisasikan. Untuk melihat realisasi anggaran tersebut dibutuhkan dokumen yang digunakan untuk merekonsiliasi antara data sistem dan data bank sehingga diperlukan prosedur penyusunan rekening koran manual.

Rekening koran adalah catatan seluruh transaksi keuangan dalam suatu rekening bank, dalam hal ini yaitu rekening kas daerah Bank BJB. Sedangkan, rekening koran manual merupakan rincian dari rekening koran bank yang disusun oleh Staf Pengolah Data dan Informasi Bidang Akuntansi BKD Kota Depok. Rekening koran manual digunakan sebagai alat bantu penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan tujuan untuk memastikan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan realisasinya. Rekening koran manual juga digunakan

ian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

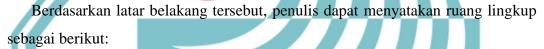


Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

sebagai alat kontrol atas transaksi-transaksi yang yang telah dilakukan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selama PKL, penulis terlibat dalam penyusunan rekening koran dan menemukan beberapa kendala, seperti kesalahan pencantuman OPD dan pengelompokan jenis transaksi. Kesalahan ini lumrah terjadi karena proses yang dilakukan secara manual dan volume transaksi yang cukup tinggi. Maka dari itu, penulis berminat untuk menetapkan judul "Penyusunan Rekening Koran Manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok".

1.2 Ruang Lingkup



- prosedur penyusunan rekening koran manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
- dokumen yang diperlukan dalam menyusun rekening koran manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
- kendala dalam penyusunan rekening koran pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, penulis memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a. mendeskripsikan prosedur penyusunan rekening koran manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
- b. mengidentifikasi dokumen yang diperlukan dalam prosedur penyusunan rekening koran manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
- c. mendeskripsikan kendala dalam prosedur penyusunan rekening koran manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.



ak Cip

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Manfaat Penulisan

Berikut terdapat manfaat dari penulisan dalam penyusunan tugas akhir antara lain:

- a. bagi penulis, mampu menerapkan materi akuntansi dan manajemen keuangan yang diperoleh semasa perkuliahan berlangsung serta berhasil meningkatkan pengetahuan tentang prosedur penyusunan rekening koran manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
- b. bagi instansi, mampu memberikan masukan yang bersifat positif seperti usulan ataupun saran untuk Badan Keuangan Daerah Kota Depok, untuk pengambilan keputusan dari kegiatan lain dan dapat mengembangkan dan memajukan instansi pada masa depan.
- d. bagi ilmu pengetahuan, mampu menjadi referensi ataupun bahan dari penelitian yang dapat meningkatkan pengetahuan, terutama untuk yang memilih tema prosedur penyusunan rekening koran manual pada program studi Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis mengumpulkan beberapa informasi dari berbagai sumber. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

- a. Wawancara melakukan diskusi langsung di Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
- b. Dokumentasi penulis mengumpulkan informasi berupa dokumentasi melalui pekerjaan dan kegiatan yang penulis lakukan yang berkaitan dengan prosedur penyusunan rekening koran manual.



Ć Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup dan tujuan penulisan pada laporan tugas akhir "Prosedur Penyusunan Rekening Koran Manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok", penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rekening koran manual merupakan proses krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui proses ini, data transaksi keuangan daerah dihimpun, diolah, dan diverifikasi untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Adapun langkah-langkah dalam prosedur penyusunan rekening koran manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok meliputi penerimaan data rekening koran dari bank kasda Bank BJB, penyusunan buku kas umum oleh Bidang Perbendaharaan, penyusunan rekening koran manual oleh Bidang Akuntansi, pemeriksaan saldo pengeluaran, pemeriksaan saldo penerimaan, pemeriksaan saldo Pengembalian Belanja (BEND 17), hingga penyempurnaan dan penyimpanan rekening koran manual.
- b. Dokumen yang diperlukan dalam prosedur penyusunan rekening koran manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok yaitu rekening koran kasda Bank BJB, buku kas umum oleh Bidang Perbendaharaan, register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), rekapitulasi penerimaan, dan Register Surat Tanda Setor (STS).
- c. Dalam prosedur penyusunan rekening koran manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok, terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi waktu penyusunan rekening koran manual seperti ketidakjelasan uraian pada rekening koran Bank BJB dan keterlambatan input Pengembalian Belanja (BEND 17) di SIPKD.



5.2 Saran

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam penyusunan rekening koran manual pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. BKD Kota Depok perlu melakukan komunikasi dengan pihak Bank BJB untuk meminta penjelasan mengenai uraian transaksi yang tidak jelas pada rekening koran. Jelaskan dampak ketidakjelasan uraian tersebut terhadap proses penyusunan rekening koran manual. Untuk mencegah adanya penumpukkan data terkait uraian transaksi yang tidak jelas di akhir bulan, Bidang Perbendaharaan BKD kota Depok dapat mengoptimalkan proses rekonsiliasi reken<mark>ing koran</mark> dengan mengubah frekuensi rekonsiliasi menjadi harian.
- BKD Kota Depok harus mengembangkan sistem *monitoring* untuk melacak status input data pengembalian belanja di SIPKD. Sistem ini dapat memberikan peringatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan input data tepat waktu dan menerapkan sanksi administratif kepada OPD yang terlambat dalam menginput data pengembalian belanja di SIPKD. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, pemotongan anggaran, atau penundaan pencairan dana.

JAKARTA



Jak Cinta

Ć Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amin, M. 2023. Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBDES. Yogyakarta: Deepublish.
- Anik, Y. 2023. Akuntansi Dana Desa. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Bakti, S. 2023. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Batin. 2022. Keuangan Publik. Jakarta: Prenada Media.
- Gaol, C. 2015. *Keandalan dan Sukses Sekretaris Perusahaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ida. 2022. Manajemen Perkantoran. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2023. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jakarta.
- Kosasih. 2021. Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifka. 2017. Step By Step Lancar Membuat SOP. Depok: Penerbit Nauli Media.
- Shatu. 2016. *Kuasai Detail Akuntansi Perkantoran*. Jakarta: Pustaka Ilmu Sentosa.
- Soemohadiwidjojo. 2020. Mudah Menyusun SOP. Jakarta: Penebar Plus.
- Sukmadian. 2017. *Manfaat Prosedur Bea Cukai Kepabeanan Ekspor Impor*. Jakarta: Grasindo.
- Sululing, S. 2018. Akuntansi Desa Teori Dan Praktek. Purwokerto: Irdh.

Peraturan:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.05/2019

 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 42 Tahun 2012.



łak Cipta

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2022 *Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok*.

Jurnal:

Hasanudin, M. 2018. "Rancang dan bangun sistem informasi inventori barang berbasis web (studi kasus pt. Nusantara sejahtera raya)". *Ikra-Ith Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika (Online)*. Vol. 2 No. 3. (https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/254/148 diakses pada 1 Mei 2024)





नेak Cipta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Wawancara dengan Irfan Taufik Analis Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Hari, Tanggal Wawancara: Rabu, 5 Juni 2024

Narasumber : Irfan Taufik

Jabatan : Staf analis laporan keuangan

Perusahaan : Badan Keuangan Daerah Kota Depok

1. Apa tujuan dari dibuatnya rekening koran manual?

Jawaban: Rekening koran manual berperan sebagai alat kontrol yang vital dalam memantau arus kas masuk dan keluar, serta mengawasi pengeluaran dan penerimaan secara menyeluruh. Ketiadaan rekening manual akan mengakibatkan kesulitan dalam mengkategorikan jenis penerimaan dan pengeluaran, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan dan akan berdampak pada laporan keuangan.

2. Kesalahan apa yang sering terjadi saat penyusunan rekening koran manual?

Jawaban: Kesalahan yang sering terjadi biasanya adalah terdapat duplikasi *input* atau kekurangan *input* pada tingkat OPD masing-masing.

3. Bagaimana memastikan bahwa data dalam rekening manual akurat dan valid?

Jawaban: Dengan menggunakan dokumen kontrol. Kontrol ini berguna untuk membandingkan jumlah transaksi di rekening koran manual dengan rekening koran yang terdapat di SIPKD yang disusun oleh masing-masing OPD. Apabila terdapat selisih, pihak BKD Kota Depok akan menghubungi pihak OPD tersebut dan memastikan keselisihan tersebut.



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2

Daftar Wawancara dengan staf Pengolah Data dan Informasi pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Hari, Tanggal Wawancara: Rabu, 5 Juni 2024

Narasumber : Romy Ardisa Gusman

Jabatan : Staf pengolah data dan informasi

Perusahaan : Badan Keuangan Daerah Kota Depok

1. Apakah BKD di seluruh pemerintahan kota lainnya juga menyusun rekening manual untuk bahan acuan laporan keuangan?

Jawaban: Ya, tetapi mungkin berbeda penyebutan karena setiap BKD memiliki kebijakan masing-masing dalam menyusun laporan keuangan.

2. Adakah sistem yang digunakan dalam penyusunan rekening koran manual?

Jawaban: Ya, terdapat sistem yang digunakan dalam penyusunan rekening koran manual, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD berperan penting dalam proses ini dengan memfasilitasi penarikan dan perbandingan data penerimaan dan pengeluaran.

3. Jenis transaksi pendapatan yang berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) ada apa saja?

Jawaban: Di lingkungan BKD, terdapat beberapa jenis transaksi pendapatan yang berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Jenis-jenis PAD tersebut meliputi:

a. Pajak daerah: Merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah berdasarkan peraturan daerah. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan daerah (pajak hotel dan restoran), dan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Retribusi daerah: Merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha atas penggunaan jasa atau pemanfaatan fasilitas milik daerah. Contohnya adalah retribusi jasa usaha, retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan retribusi perizinan dan pemeriksaan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah umum. Contohnya adalah dividen dari perusahaan daerah dan pendapatan dari sewa menyewakan aset daerah.
- d. Lain-lain PAD yang sah: Merupakan jenis PAD lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah pendapatan dari denda pelanggaran peraturan daerah dan pendapatan dari penjualan aset daerah.

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

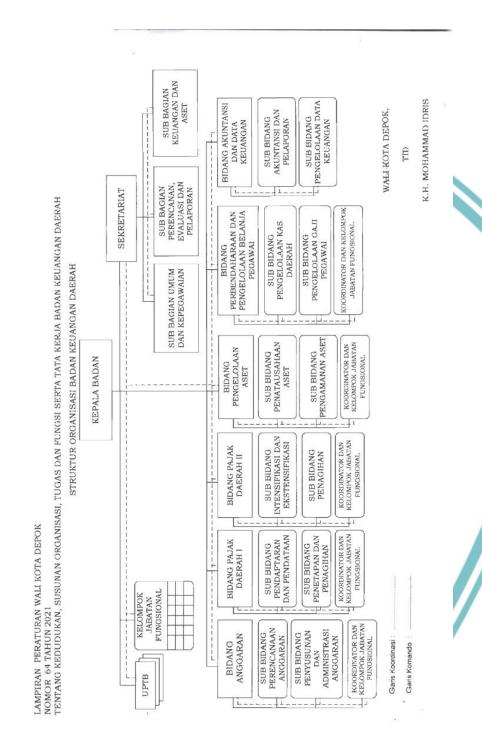
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Depok, 2024

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4

Rekening Koran Manual Badan Keuangan Daerah Kota Depok

11	OK	OK	οK	OK	X	ΟK	ð	Š	X	X	X	X	š	X is	X i	5 8	5 8	š	4N OK	KALOK	RM OK	RAIOK	š	ž č	Y OF	X	N OK	λO	Š	ž š	5 8	šš		
10	PAJAK HOTEL - RUMAH KOS	PAJAK HOTEL - WISMA	PAJAK RESTORAN - RESTORAN	PAJAK RESTORAN - RUMAH MAKAN	PAJAK RESTORAN - CAFÉ	PAJAK HIBURAN - FILM	PAJAK HIBURAN - KARAOKE	PAJAK HIBURAN - KETANGKASAN	PAJAK REKLAME - PAPAN	PAJAK REKLAME - KAIN	PAJAK PARKIR	PAJAK AIR TANAH	PBB	PBB	PBB	PBB	0000	BPHTB	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN OK	RETRIBUSI PENYEDIAAN PENYEDOTAN KA OK	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERM OK	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAI OK	RETRIBUSI PASAR	RETRIBUSI TERMINAL	DETRIBUSI PARKIR	RETRIBUSI IMB	LAIN PAD - DENDA PAJAK RUMAH MAKAN OK	LAIN PAD - DENDA PAJAK PARKIR	LAIN PAD - DENDA PAJAK AIR TANAH	KAS DI BP 2022				
6	492.068.079.543,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	492.072.817.043,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	493.831.005.758,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	493.927.296.730,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	494.138.700.531,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	494,203.701.419,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	494.210.546.572,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	494.564.610.205,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	494,793.681,772,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	494,795,091.172,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	495.869.355.882,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	495.876.421.482,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	495.975.117.575,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	495.990.986.922,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	495.992.182.489,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	440.392.703.176,00 BADAN VELANDAN DAERAH	436.020.030.010,00 BADAN KETANDAN DAEDAH	496 042 313 182 00 BADAN KEJANGAN DAFRAH	496.046.738.182,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	496.059.578.182,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	496.064.194.582,00 DINAS PERHUBUNGAN	496.081.874.182,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	496.092.054.682,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	496.093.898.182,00 DINAS PERHUBUNGAN	496.095.914.182.00 DINAS PERHUBUNGAN 496.098.814.192.00 DINAS PETAMANAN DANGAN DEDIZANIAN DAN DEDIZANIAN	496.139.191.182.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	496.139.715.342.00 BADAN KEUANGAN DAERAH	496.139.811.342,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	496.139.852.002,00 BADAN KEUANGAN DAERAH	496.148.628.502,00 DINAS PENDIDIKAN	436:147.187.523,00 INSPENTORAL DAEDAH	496.136.097.007 DINAS PENDIDIKAN	00 0 00 100 100 100 100 100 100 100 100	
7																														4 440 077 00	700 700 V	10.610.299,00	0,00 12.531.465,00 12.531.465,00	
9	3.900.000,00	4.737.500,00	1.758.188.715,00	96.290.972,00	211.403.801,00	65.000.888,00	6.845,153,00	354.063.633,00	229.071.567,00	1.409.400,00	1.074.264.710,00	7.065.600,00	98.696.093,00	15.869.347,00	1.195.567,00	22 006 000 00	4 902 256 00	10.654.850.00	4.425.000,00	12.840.000,00	4.616.400,00	17.679.600,00	10.180.500,00	1.843.500,00	2.016.000,00	40.517.000.00	524.160,00	96.000,00	40.660,00	8.776.500,00	3	3AN SITI & MASPUPA	0,00 4,084,448,959,00 4,084,448,959,00	
3	nuari Pajak Losmen/Rmh Penginapan/Rmh Kost		Januari Pajak Restoran	nuari Pajak Rumah Makan	nuari Pajak Café	nuari Pajak Tontonan FilmiBioskop	Januari Pajak Karaoke	Pajak Permainan Per	Januari Pajak Reklame Papan/Bilboard/Megatron		1		T	nuari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB dari PT. POS)	I	Januari Pajak bumi dan bangunan (Pob dan biri)	T		Γ	Retribusi Penyediaar	Ret. Pengujian Kenda		T	T	Januari Ket. I empat Khusus Parkir Include Det Brimsh Betene Meuran (BBL)	Ret. Izin Mendirikan	Pendapatan Denda R			Tudari Setoran Pengembalian GU Keg. Evaluasi Kinerja	E344/SPZDI6100202	Τ	CERTIFICATION BY THE TOTAL BY THE	
3	Januari	Janu	Janu	Januari	Januar	Januari	Janu	Janu	Janı	Januar	Janı	Jannau	Januar	Jannari	Janı	Januar	herroel	uan.	Janu	Janu	Janu	Januari	Januar	Januari	Januar	Janu	Januari	Janu	Janı	Januar	igning	Januari		
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	10	9	9 :	10	2 \$	2 5	10	9	10	10	10	9	9 9	9 9	9 0	9	10	9	9	2 0	9		

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Depok, 2024

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Lampiran 5

Dokumen Kontrol Rekening Koran Manual

PEMERINTAH KOTA DEPOK KONTROL R/K SKPD **TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	URAIAN	RK SIPKD	RK Manual	Selisih	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	666.669.720.320,00	666.669.720.320,00		OK
2	DINAS KESEHATAN	445.922.793.838,00	445.922.793.838,00		OK
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	471.678.358.060,00	471.678.358.060,00		OK
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	204.536.118.756,00	204.536.118.756,00		OK
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	453.875.850.361,00	453.875.850.361,00		OK
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN				
6	PENGEMBANGAN DAERAH	17.646.990.575,00	17.646.990.575,00		ок
7	DINAS PERHUBUNGAN	78.686.495.997,00	78.686.495.997,00		ОК
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25.729.253.017,00	25.729.253.017,00		ОК
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,				
9	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	32.510.851.052,00	32.510.851.052,00		ок
10	DINAS TENAGA KERJA	12.764.206.903,00	12.764.206.903,00		ОК
11	DINAS SOSIAL	27.310.396.626,00	27.310.396.626,00		ОК
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	29.231.216.957,00	29.231.216.957,00		OK
13	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	33.258.554.216,00	33.258.554.216,00		ОК
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	43.525.918.594,00	43.525.918.594.00		ОК
15	SEKRETARIAT DAERAH	143.397.589.949.00	143.397.589.949,00		ОК
16	SEKRETARIAT DPRD	128.203.280,616.00	128.203.280.616.00		ОК
17	INSPEKTORAT DAERAH	18.343.251.840.00	18.343.251.840.00		ОК
18	BADAN KEUANGAN DAERAH	(3,526,206,440,050,00)	(3.526.206.440.050.00)		ОК
19	KECAMATAN BEJI	36.170.852.410,00	36.170.852.410,00		ОК
20	KECAMATAN CIMANGGIS	37.897.515.662,00	37.897.515.662,00		ОК
21	KECAMATAN LIMO	23.888.975.177,00	23.888.975.177,00		ОК
22	KECAMATAN PANCORAN MAS	38.826.869.231.00	38.826.869.231.00		OK
23	KECAMATAN SAWANGAN	38.744.309.677.00	38.744.309.677.00		ОК
24	KECAMATAN SUKMAJAYA	39.641.951.313,00	39.641.951.313,00		OK
25	KECAMATAN TAPOS	40.332.826.399,00	40.332.826.399,00		ОК
26	KECAMATAN CINERE	22.197.182.216,00	22.197.182.216,00		ОК
27	KECAMATAN CIPAYUNG	29.166.631.355,00	29.166.631.355,00		OK
28	KECAMATAN BOJONGSARI	37.097.710.262,00	37.097.710.262,00		ОК
29	KECAMATAN CILODONG	28.330.037.862,00	28.330.037.862.00		ОК
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34.250.100.802,00	34.250.100.802,00		OK
31	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	31.329.850.415,00	31.329.850.415,00		OK
-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	52.525.555.725,00	52.525.555.725,00		
32	PINTU	5.341.003.201.00	5.341.003.201,00		ОК
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	5.5.1.005.201,00	5.5.1.005.201,00		
33	MANUSIA	26.329.167.804.00	26.329.167.804.00		ОК
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	17.530.528.292,00	17.530.528.292,00		OK
35	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	35.994.725.607,00	35.994.725.607,00		OK
36	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	21.227.954.628.00	21.227.954.628.00		OK
37	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	24.780.574.548.00	24.780.574.548.00		OK
	TOTAL	(123.836.825.512,00)	(123.836.825.512,00)		ОК

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Depok, 2024

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.